

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.M. Yunus Wahid, 2016, *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Abdul Wahab Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdulsyani, 2007, *Sosiologi: skematika, teori, dan terapan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Z, 2015, *Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin Tahir, 2011, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Indonesia Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, J, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1998.
- Bintarto, R, 1989, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budi Santosa, 2020, *Hukum Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Budi Santosa, 2020, *Hukum Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Gadjah Mada University Press.
- Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Pressindo: Yogyakarta.
- Budi Winaro, 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Med Press Anggota IKAPI.
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- CST Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata, Jakarta.
- D.A Tisnaamidjaja dan Asep Warlan Yusuf, 1997, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2003, *Pedomah Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Wilayah Propinsi*, PT Mediatama Saptakarya.

- Dian Ekawaty Ismail, 2019, *Hukum Tata Ruang Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh*, UIIPress, Yogyakarta.
- Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022, *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*, Samudra Biru: Yogyakarta.
- Edi Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Erman Rajagukguk, 2009, *Hukum Tata Ruang dan Pengaturan Penggunaan Tanah*, Penerbit UI Press.
- Friedmann, J, 1987, *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*, Princeton University Press.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah: Dalam Konteks UUPA, UUPR, UUPLH*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, 1994, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana, Jakarta, 2017.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka refleksi, Makassar.
- Kartodihardjo, H., dan Suntana, A. S., 2010, *Penataan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Gagasan Prof. Emil Salim dan Implementasinya Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor.
- Lemos, M.C., dan Agrawal, A, 2006, *Environmental Governance*, Annual Review of Environment and Resources.
- Leo Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- M. Irfan Islamy, 2009, *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Irfan Islamy, 2009, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- M. Irfan Islamy, 2009, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.

- Maret Priyanta, 2015, *Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Halrev Vol 1 Issue 3.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2014, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Jakarta.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Cet II.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirjo, 1962, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Rajagukguk, Erman, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Peranannya dalam Pembangunan Nasional*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Jakarta.
- Said, M, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Cet.III, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, cet. ke-6, Citra Aditya Bakti.
- Sholichin Abdul Wahab, 2008, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Simarmata, R, *Hukum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Siti Marwiyah, 2022, *Buku Ajar Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, CV. Mitra Ilmu: Makassar.
- Soemardjan, S., & Soemardi, S, 1964, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab, 2008, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Subekti, R, 2012, *Hukum Tata Ruang: Prinsip, Instrumen, dan Implementasinya dalam Pembangunan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharsono, 2004, *Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Nasional*, Liberty, Yogyakarta.

- Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Van Apeldoorn, L.J., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. diterjemahan: Oetarid Sadino, Pradnya Paramita: Jakarta, 2008.
- Wicaksono, A, 2014, *Pengelolaan Kawasan Tambang Berkelanjutan: Antara Kepentingan Ekonomi dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Widodo, B., 2021, *Penataan Ruang dan Kepastian Hukum*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Yunus, H. S, 2008, *Geografi Perkotaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta, Kencana, 2014.

B. Jurnal/Skripsi/Disertasi/Lokakarya

- Aca Sugandi, "Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan Sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan", *Makalah pada Komperensi PSL VII 1987 di Sulawesi Selatan*.
- Adi Sabar Ginting, Ruri Prihatini Lubis & Wahyu Hidayat, 2025, "Integrasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Participatory dan Evaluasi Lokasi Teknis untuk Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Perumahan", *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*.
- Adi Sabar Ginting, Ruri Prihatini Lubis & Wahyu Hidayat, 2025, "Integrasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Participatory dan Evaluasi Lokasi Teknis untuk Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Perumahan", *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*.
- Agracecia Ebona Togatorop, Yevanya Sagita Purba Siboro, Moh. Imam Gusthomi, 2024, "Analisis Yuridis Izin Usaha Pertambangan: Studi Kasus PT. Mantimin Coal Mining Nomor Perkara 241/G/Lh/2018/Ptun.Jkt", *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*.
- Alamsyah, R., Prawira, Y., & Harahap, M, 2022, "Harmonisasi Tata Ruang dan Perizinan Sektor Pertambangan: Studi di Kawasan Sumatera", *Jurnal Perencanaan Wilayah*.
- Alofsen Sianturi, 2023, "Degradasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lingkungan Pasca Omnibus Law", *Locus Journal of Academic Literature Review*.
- Alvi Rahman Nauli, 2024, "Implementasi Kebijakan Batu Pengaturan Pengangkutan Bara di Kota Jambi Provinsi Jambi", Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Annisa Khairiyyah dan Latifah Amir, 2022, "Implementasi Pengaturan Tata Ruang Kota Melalui Penerapan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi", *Mendapo: Journal of Administrative Law*.
- Annisa Triana Zanur, A. Zarkasi, Meri Yarni, 2024, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengangkutan Batu Bara Dalam Provinsi Jambi", *Journal of Constitutional Law*.

- Ano Dwi Wijaya et.al., 2025, "Harmonisasi Pengaturan Tata Ruang Antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dan Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja; Perspektif Penataan Ruang Dan Kepastian Investasi", *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*.
- Ardian Havidani, Ipah Ema Jumiati dan Suwaib Amiruddin, 2024, "Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Kota Serang Provinsi Banten", *Jurnal Niara*.
- Ari Mochamad et. all., 2017, "Paradigma Konservasi dalam Pembangunan Berkelanjutan", *White Paper IV*.
- Aria Permana, Jonny Wongso dan Era Triana, 2022, "Perkembangan Struktur dan Elemen-Elemen Pembentuk Ruang Tanah Pilih Pusako Batuah Pusat Kota Jambi", *Jurnal Arsir Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Arief Huzeini, Hery Suhartoyo Dan Agus Susatya, 2019, "Studi Evaluasi Pascatambang PT. Ratu Samban Mining Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu", *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*.
- Ayu Mardalena, Supriatna dan Muhammad Dimyati, 2024, "Pemodelan Spasial Lahan Terbangun Kota Jambi", *Majalah Geografi Indonesia*.
- Bappenas, 2021, *Laporan Evaluasi Sistem Perencanaan dan Tata Ruang Pasca UU Cipta Kerja*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta.
- Bappenas, BIG, dan LAPAN, 2021, *Pedoman Implementasi Kebijakan Satu Peta Nasional*, Jakarta, Sekretariat Kebijakan Satu Peta.
- Benny Kenjiroh Munthe, 2025, "Analisis Hukum Tata Ruang di Indonesia: Tantangan dan Implementasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan", *Media Hukum Indonesia (MHI)*.
- Bewa Dangu Wole, Annisa Purwatiningsih, dan Kamaluddin Kamaluddin, 2021, "Iklim Investasi dalam Penyelesaiannya Penerapan Omnibus Law", *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)* 3.
- Citra Darminto, Hapsa, Ahmad Baidawi, 2021, "Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batubara", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*.
- Deni Santoa, Bambang Gunawana, Kariyonoa Dan Toto Hernawoa, 2021, "Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Penataan Ruang Di Era Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode E-Learning Dan Blended Learning", *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*.
- Desga Perkasa, Dyah Ayu Istiqomah Dan Nuraini Aisiyah, 2022, "Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Widya Bhumi*.
- Dessy Kurnia, Suparji Dan Anis Rifai, 2025, "Tinjauan Hukum Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Bedah Hukum*.
- Dyah Fitriani Adiningsih, Sutaryono dan Wahyuni, 2023, "Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di kabupaten Pati Jawa Tengah", *Tunas Agraria*.

- Epi Syahadat Dan Subarudi, 2012, "Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi", *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*.
- Fatia Kultsuma, 2023, "Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia", *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria*.
- Felicia Nathania Kindangen, Grace H. Tampongangoy, dan Susan Lawotjo, 2023, "Penetapan Wilayah Pertambangan Dalam Melakukan Perjanjian Usaha Pertambangan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023", *Jurnal Unsrat Lex_Administratum*.
- Haryo Winarso dan Delik Hudalah, 2020, *Planning and Politics in Contemporary Indonesia*, Springer.
- Helmi, 2021, "Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Berusaha Dalam UU Cipta Kerja", *Jurnal Ilmiah Hukum Simbur Cahaya*.
- Helmi, 2021, "Model Omnibus Law untuk Harmonisasi Peraturan Daerah", *Undang: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2*.
- Hendro Sulistiyo, Florentina Ratih Wulandari dan Rudi Subiyakto, 2024, "Partisipasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan Penataan Ruang Dan Dampaknya Pada Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Tanjungpinang", *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*.
- I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, 2016, "Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah", *Jurnal Magister Hukum Udayana*.
- Ida Farida, 2024, Pembangunan Tata Ruang Di Indonesia: Tantangan Dan Harapan, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.
- Issa Arwani, Widhy Hayuhardhika Nugraha Putra, Ghazian Hamdi, Dan Tsania Dzulkarnain, 2022, "Perancangan Dan Implementasi Sistem Deteksi Informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berbasis Web Dengan Fitur Geo-Intersection Pada Postgis", *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*.
- Junior Hendri Wijaya, Sutoro Eko Yunanto, Yuli Setyowati dan Supardal, 2022, "E-partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan E-government di Indonesia Tahun 2003-2020", *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*.
- Kementerian ATR/BPN, 2022, *Pedoman Harmonisasi Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota*.
- Laode Muh Asfan Mujahid et. all., 2024, "Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Rencana Tata Ruang di Kawasan Bantaran Sungai Kota Makassar", *Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat)*.
- Lewin, K, 1951, "Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers", Harper & Brother, journals sagepub. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/000271625127600135?>
- Lisda Syamsumardian, 2023, "Pengawasan Pemerintah Pusat Atas Kerusakan Lingkungan Pada Kegiatan Tambang Batu Bara", *SELISIK*.

- Mohamad Nasir, 2020, "Implikasi Ketidakpastian Hukum Tata Kelola Perizinan Sektor Pertambangan Batubara Terhadap Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup: Studi Kasus Kalimantan Timur", *Auriga Nusantara*.
- M. Panji Prabu Dharma, 2019, "Konstruksi Hukum Penguatan Izin Pertambangan Rakyat Pasca Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014", *Jurnal Ius*.
- M.Marfiliansyah Ridho Ilahi et. all., "Transfer of Government Authority to Manage Mineral and Coal Mining After The Enactment Of Omnibus Law", *Communale Journal*.
- Muhammad Asadz, 2023, "Konflik Tambang Emas Di Hutan Adat (Studi Kasus Di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi)", Skripsi Program Studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.
- Muhammad Hardi dan Mussadun, 2016, "Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Pidie", *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*.
- Nandang Najmulmunir, 2013, "Pengaruh Partisipast Masyarakat Terhadap Efektifitas Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi", *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*.
- Ni Made Jaya Senastri, 2019, "Urgensi Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Yang Berbasis Kearifan Lokal Dalam Sistem Penataan Ruang Nasional Berkelanjutan", Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Nizar Rabbi Radliya, Rauf Fauzan dan Hani Irmayanti, 2018, "Pengembangan Sistem Informasi Geografis Menggunakan Konsep Participatory Gis Dalam Manajemen Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung", *Jati: Jurnal Teknologi Dan Informasi*.
- Nugraha, B. Y., & Arifin, S, 2021, "Transformasi Kebijakan Penataan Ruang dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Nursina Afriyana, Rts. Fanny Inayah dan Eko Nuriyatman, 2021, "Pengaturan Pembangunan Rumah dan Toko atau Ruko Di Kota Jambi Berdasarkan Konsep Tata Ruang Perkotaan", *Mendapo: Journal of Administrative Law*.
- Nurwadjedi, 2019, *Kebijakan Satu Peta untuk Pembangunan Indonesia*, Badan Informasi Geospasial, Cibinong.
- Padmo Wahjono, 1991, "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", dalam *majalah Forum Keadilan* No.29.
- Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika, No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hal. 1.
- Rudiarto, I., & Pratiwi, M. A, 2021, "Reposisi Fungsi RTRW dalam Harmonisasi Kebijakan Ekstraktif", *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*.
- Runa Roveria, 2024, "Pengawasan pertambangan berdasarkan UU dan Permen ESDM: peran masyarakat & koordinasi daerah", *Scribd*.
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.
- Samsul Hidayat, 2021, "Rekontruksi Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Guna Memberi Nilai

- Tambah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Regional Berbasis Nilai Keadilan", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Unissula.
- Sihotang, J. P, 2020, "Sinkronisasi Perizinan Tambang dengan RTRW: Sebuah Tinjauan Yuridis dan Spasial", *Jurnal Hukum & Lingkungan*.
- Simarmata, R, 2023, "Implikasi UU Cipta Kerja terhadap Penataan Ruang dan Lingkungan" *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*.
- Sri Nurhayati Qodriyatun, 2020, "Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja", *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*.
- Sumbangan Baja, 2016, *Aspek Penataan Ruang Dalam Amdal*, Puslitbang LH, Universitas Hasanudin.
- Sutanto, A., & Marfai, M. A, 2016, "Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Perubahan Tata Ruang Wilayah Kota", *Jurnal Bumi Lestari*.
- Sutaryono & Asih Retno Dewi, "Model Neraca Penatagunaan Tanah sebagai Instrumen Evaluasi Perubahan Tata Guna Lahan", *Jurnal Wilayah dan Tata Ruang*, Vol. 10, hlm, 2.
- Sutaryono dan Asih Retno Dewi, 2020, "Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Untuk Percepatan Penyusunan Rdtr-Pz", *Jurnal Pertanian*.
- Sutaryono Sutaryono, Arsan Nurrokhman Dan Novita Dian Lestari, 2021, "Penguatan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Pengembangan Kota*.
- Suyamto, R., Pribadi, D. O., Nugroho, S. P., & Sitorus, S. R. P, 2022, "Pengaruh Pertambangan terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Tata Ruang Wilayah", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*.
- Teguh Prasetyo Dan Maharani Nurdin, 2021, "Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Kertha Semaya*.
- Wahyudi Kumorotomo, 2021, "Implikasi Cipta Kerja terhadap Kewenangan Daerah", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 7 No. 1.
- Widiyanto, S., Rukma, A., dan Sari, E, 2022, "Data Integrasi dalam Perencanaan Spasial dan Tantangan Interoperabilitas", *Jurnal PWK ITB*.
- Wulan Dwi Purnamasari, Dian Indah Shofarini, Sara Irawati Dan David Satria S. 2022, "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Tata Ruang Di Kota Blitar", *Ub Publish*.
- Yolanda Claesa, M. Andika dan Elita Rahmi, 2021, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Jambi", *Mendapo: Journal of Administrative Law*.
- Yulian Dwi Nurwanti, M. Aziz Zaelani dan Dina Irawati, 2022, "Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara", *Amnesti: Jurnal Hukum*.
- Yusuf, H., & Suprpto, D, 2019, "Dampak Jalan Tambang terhadap Perubahan Tata Guna Lahan di Kalimantan", *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*.

C. Media Online

Admin Bappeda, "Teori dan Indikator Pembangunan", *bappeda.bulelengkab.go.id*, Artikel, 16 Februari 2017.

Admin Kemenkumham Jambi, "Harmonisasi Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043", *Kanwil Kementerian Hukum RI Provinsi Jambi*, Berita, 27 December 2022. <https://jambi.kemenkum.go.id/berita-utama/harmonisasi-ranperda-tentang-rencana-tata-ruang-wilayah-provinsi-jambi-tahun-2023-2043>

Agung Hermansyah, "Isu Hubungan Pusat-Daerah dalam UU Cipta Kerja", *hukumonline.com*, Artikel, 27 November 2020.

Agus Suprayitno, "Gubernur Jambi dorong potensi bagi hasil sawit serta hutan & tambang", *Antaranews.com*, Berita, <https://jambi.antaranews.com/berita/621649/gubernur-jambi-dorong-potensi-bagi-hasil-sawit-serta-hutan-tambang>?

Andhika Ikhwani Wiryan, "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tata Ruang Tahun 2021", *Kementerian ATR/BPN Direktorat Jenderal Tata Ruang*, Laporan, 2022. <https://itjen.atrbpn.go.id/laporan%20kinerja%202021/lkj-inspektorat-jenderal-2021>

Arbie Marwan, "Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Jambi 2023-2043", *Aktual.com*, Berita, 12 Desember 2023.

Ariyadi, "Dampak Pertambangan Batu Bara terhadap Kondisi Masyarakat Provinsi Jambi", *ANTARA News Jambi*, Berita, 21 Februari 2025. <https://jambi.antaranews.com/berita/605557/dampak-pertambangan-batu-bara-terhadap-kondisi-masyarakat-provinsi-jambi>

Asep Munajat, "Pusat Data Tata Ruang Kabupaten Tangerang (PUTRA): Inovasi Digital untuk Pengelolaan Tata Ruang yang Efisien", *lensafokus.id*, Berita, 09 August 2024.

Badan Informasi Geospasial, "Implementasi Kebijakan Satu Peta Mengatasi Permasalahan Tumpang Tindih Lahan", *Badan Informasi Geospasial*, Berita, 26 Juni 2025.

Daddy Rohanady, "Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat", *Internationalmedia*, Artikel, 22 November 2021.

Eddy Cahyono Sugiarto, "Investasi dan Indonesia Maju", *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, Berita, 02 Agustus 2019. https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju.

Edi Purwanto, "selesaikan jalur khusus batu bara", dikutip dari *Detik.com*, Berita, 25 Februari 2024, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7716227>

Eko Subhan, "Pentingnya Partisipasi Publik dalam Penataan Ruang", *IAP2 Indonesia*, Artikel, February 21, 2014. <https://iap2.or.id/pentingnya-partisipasi-publik-dalam-penataan-ruang/>

Eksekutif Daerah WALHI Jambi, "Catatan Akhir Tahun: Tanah, Bara dan Pin Emas", *WALHIJAMBI.or.id*, Artikel, 31 Desember 2024.

Elan Dika Saputra, "Efektivitas Pelaksanaan Perda No 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043", *Bitnews.id*, Artikel, 29 Juni 2024.

Ferdi Almunanda, "73% Kawasan Hutan Hilang Sebabkan Bencana Banjir Besar di Jambi", *Detik Sumbagsel*, Berita, 14 Januari 2024.

<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7140238/73-kawasan-hutan-hilang-sebabkan-bencana-banjir-besar-di-jambi>

Galuh Shita, "Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)", *Lembaga Lokalaras Indonesia*, Artikel, 28 mei 2021.

Gresi Plasmanto, "Mengangkangi Perda Tata Ruang, Pemkot Jambi Tolak Pembangunan 'Stockpile' Batu Bara", *Liputan6.com*, Berita, 15 Februari 2025.

<https://www.liputan6.com/regional/read/5919756/mengangkangi-perda-tata-ruang-pemkot-jambi-tolak-pembangunan-stockpile-batu-bara>

Irma Tambunan, Rhama Purna Jati, "Sepuluh Tahun Penantian Jalan Khusus Batubara di Jambi", *Kompas.id*, Berita, 13 Juni 2022.

Jazil Baskara, "Analisis Pentingnya Tindak Hukum Dalam Penggunaan Jalan: Permasalahan Kemacetan Akibat Tambang Batu Bara Di Provinsi Jambi", *Unand.ac.id*, berita, 04 April 2024.

Metropolis, "Menyelaraskan Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043, Daerah Masih Butuh Pendampingan", *Jambiupdate.co*, Berita, 13 desember 2023.

Nanang Mairiadi, "Jambi tunggu persetujuan Kementerian ATR/BPN terkait Perda Tata Ruang", *Antaraneews.com*, Berita, 16 Desember 2022.

Nanang Mairiadi, "Habis 100 tahun lagi, Jambi miliki cadangan 1,9 miliar ton batu bara", *ANTARA News*, Berita, 12 Oktober 2024.

<https://www.antaraneews.com/berita/3197417>

Panrb dan Universitas Indonesia, "Pemantauan & Evaluasi SPBE: Domain Tata Kelola", *studylib.net*, 2022. <https://studylib.net/doc/25868469/4.-bagian-ii-modul-tata-kelola?>

Rahmad, "Kawasan Tambang Masuk Peta Khusus RTRW Kaltim", *Antara kaltim*, Berita, 11 Agustus 2015.

<https://kaltim.antaraneews.com/berita/27047/kawasan-tambang-masuk-peta-khusus-rtrw-kaltim>

Risza S Bassar, "Tegas! Gubernur Jambi Minta Kewenangan di Sektor Batu Bara Jangan Hanya di Pusat Saja", *jambi-independent.co.id*, Berita. <https://jambiindependent.disway.id/read/699876/tegas-gubernur-jambi-minta-kewenangan-di-sektor-batu-bara-jangan-hanya-di-pusat-saja>

Rizki Amalia, 2022, Rakor Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, *rri.co.id*. <https://www.rri.co.id/daerah/113448/rakor-rencana-tata-ruang-wilayah-provinsi-jambi>.

Septiawan Agung, "Target kuota batu bara Jambi tahun 2024 turun karena kendala jalur transportasi baik di darat maupun sungai", *Detik.com*, Berita, 25 Februari 2024. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7716227>

Siaran Pers, "Satu Data Indonesia: Kunci Perbaikan Tata Kelola Data untuk Mempertajam Strategi dan Fokus Pembangunan", *Bappenas.go.id*, Berita, 05 Agustus 2020. <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/satu-data-indonesia-kunci-perbaikan-tata-kelola-data-untuk-mempertajam-strategi-dan-fokus-pembangunan-Z0c7Q?>

Sutaryono, "Era Baru Penataan Ruang", *manajemenpertanahan.blogspot.com*, Artikel, 8 November 2021.

Syahreddy, "Provinsi Jambi Kaya Sumber Daya Alam, Mengapa Konflik Lahan Masih Sering Terjadi", *Kabar Jambi Kito*, Berita, 25 Oktober 2022.

<https://www.kabarjambikito.id/opini/pr-5915319286/provinsi-jambi-kaya-sumber-daya-alam-mengapa-konflik-lahan-masih-sering-terjadi>

Wahdi Septiawan, "Hingga Agustus 2023 baru terangkut 11,6 juta ton batu bara dari target 36,5 juta ton", *Kompas.com*, Berita, 30 Agustus 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/08/30/>

WALHI Jambi, "Laporan Analisis Substansi RTRW Provinsi Jambi 2023 dan Potensi Konflik Wilayah Kelola Rakyat", *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Jambi*. Artikel, 2023.

Yessy Artada, "Dirjen PPTR: Penyederhanaan Penerbitan KKPR Jadi Kunci Keberhasilan Investasi", *jppnn.com*, Artikel, 18 Oktober 2024. <https://www.jppnn.com/news/dirjen-pptr-penyederhanaan-penerbitan-kkpr-jadi-kunci-keberhasilan-investasi?page=2>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

_____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

_____, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

_____, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

_____, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033.

_____, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043.